

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, Surat-surat Berharga, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Arrasjid, Chainur, Hukum Pidana Perbankan, Cet.Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Atmadjaja, Djoko Imbawani, 2012, Hukum Dagang Indonesia (Sejarah Pengertian dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang), Setara Press, Malang.

Bukara, Maikel Pieter, “Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,” *Lex Crimen*, V.7 (2016).

Dirdjosisworo, Soejono, Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum), Cet.1 (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Djumhana, 2016, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dudley, W. C., and R.G. Hubbard, ‘How Capital Markets Enhance Economic Performance and Facilitate Job Creation’, *Global Marketing Institute Goldman Sachs*, November, 2004.

Fure, Joey Allen, “Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” *Lex Crimen*, V. June (2016).

Hasyim, Farida, 2014, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta.

Imaniyati, Neni Sri, “Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah,” *Mimbar*, XXVII.2 (2011).

Isnaeni, Moch, Hukum Benda Dalam Burgerlijk Wetboek, Cetakan Pe (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016).

James Julianto Irawan, Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

Kumendong, Erastus, ‘Surat Berharga Perbankan Dalam Kegiatan Pembayaran Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998’, *Lex Privatum*, VI.3 (2018).

Liabrintika Oktaviani Gunawan, dkk, 2014, Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit oleh Bank, Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Murwadji, Tarsisius, Integrasi Audit Mutu Hukum Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi di Indonesia, ed. by Efa Laela F Ida Nurlinda, Cetakan Pertama (Bandung: Unpad Press, 2007).

Sentosa Sembiring, 2016, Hukum Surat Berharga, Nuansa Ulia, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2016, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok.

Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

B. Jurnal

Donald, Henry, and Jamilus Jamilus, 'Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit', Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19.4 (2019) <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.539-562>

Irham Faishal, Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan, Diponegoro, Law Journal Volume 8 Nomor 1, 2019.

Johannes Ibrahim (1), Hubungan Kontraktual Dalam Kontrak Bisnis, Kolerasi antara ranah Hukum Privat Dan Hukum Publik, Bandung: Universitas Pasundan, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 8, Nomor 1, 2007.

Mastra, Ni made Maharatih Prabandari, and A.A. Sri Indrawati, 'Penyelesaian Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan', Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6.1 (2018).

Nyoman Samuel Kurniawan, Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan), Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3, Nomor 1, 2014.

Saputra, Ferdy, 'Kriteria Cek Dan Bilyet Giro Dalam Transaksi Bisnis Yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana Dan Perdata', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6.1 (2019), 27 <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2264>.

Sinaga, Toga Lamhot, 'Sistem Hukum Pidana Terhadap Cek/Bilyet Giro Kosong', *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat / Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia*, 7.1 (2021).

Sinaga, Toga Lamhot, "Sistem Hukum Pidana Terhadap Cek/Bilyet Giro Kosong," *To-Ra*, 7.1 (2021), 199–207 <https://doi.org/10.33541/jtvol5iss2pp102>

Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Bogor, 2006.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum dan HAM, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 5.2 (2018).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Staatblad Tahun 1847 Nomor 23, 1847.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro, (2006), Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 248), 2016.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/10/DASP Tanggal 8 Juni 2000, Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, (2000), Jakarta.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP/2007, Perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/32/DPSP Tahun 2006, Perihal Bilyet Giro Bilyet Giro. (2006), Jakarta.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/12/DPSP Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 Perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, Jakarta.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/32/DPSP Perihal Bilyet Giro. (2016), Jakarta.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tahun 1995.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3632 (Menteri Sekretaris Negara, 1996).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3790. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3889 (Menteri Negara Sekretariat Negara, www.hukumonline.com/pustakadata, 1999).

D. Internet

[https://www.bankmandiri.co.id/2023-01-12/Persyaratan Pembukaan Giro](https://www.bankmandiri.co.id/2023-01-12/Persyaratan%20Pembukaan%20Giro) Diakses pada 12 Januari 2023. Pukul :14.00 wib.

[https://www.bankmandiri.co.id/2023-01-11/ Tentang Bank Mandiri](https://www.bankmandiri.co.id/2023-01-11/Tentang%20Bank%20Mandiri). Diakses pada 12 Januari 2023. Pukul :15.00 wib.

<https://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/>Diakses pada 10 Januari 2023. Pukul: 16.00 wib.

<http://carajadikaya.com/risiko-operasional-perbankan/> diunduh pada tanggal 15 Maret 2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/2023-03-11/10> Bank dengan aset Jumbo di Indonesia. Diakses pada 12 Maret 2023. Pukul :15.00 wib.

[https://idtesis.com/Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif/](https://idtesis.com/Metode%20Penelitian%20Hukum%20Empiris%20dan%20Normatif/)diunduh pada tanggal 15 Januari 2023.

Maryanto, Urgensi Pembaharuan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, Yustisia, 4.1 (2015), 220–34
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1i0.2868>.

Otoritas, Jasa Keuangan, ‘Ikhtisar Perbankan’, [https://www.Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Perbankan/Ikhtisar Perbankan/Pages/ Lembaga-Perbankan. Aspx](https://www.Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Perbankan/Ikhtisar%20Perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx), 2019
[https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisarperbankan/Pages/Lembaga - Perbankan.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisarperbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx).